

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Isu pelaporan tanggungjawab sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin umum dalam dunia bisnis di Indonesia seiring dengan banyaknya CSR diimplementasikan oleh dunia bisnis. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah mengenai pengungkapan praktik CSR dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Konsep CSR kini tidak hanya dipakai ekonomi konvensional tetapi juga berkembang dalam ekonomi yang berbasis syariah. Perkembangan CSR dalam ekonomi Islam mempunyai dampak pada meningkatnya perhatian masyarakat terhadap instansi-instansi atau lembaga syariah. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat untuk mengenal secara lebih dalam terhadap lembaga atau institusi syariah semakin besar dari waktu ke waktu (Widiawati, 2012). Apalagi Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam membuat perkembangan ekonomi dan bisnis berbasis Islam berkembang dengan baik di Indonesia yang ditandai dengan bermunculannya berbagai entitas dan lembaga keuangan syariah (Ramadhani, 2016).

Pengungkapan CSR memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan terutama manfaat jangka panjang. Namun, pengungkapan CSR dalam prinsip Islam masih belum sepenuhnya dapat mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial secara menyeluruh, sehingga perlu adanya *Islamic Social Reporting* (ISR) untuk melengkapi pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang belum termuat di dalam CSR (Jannah dan Asrori, 2016).

*Islamic Social Reporting* merupakan kerangka khusus yang berguna bagi para pembuat keputusan Muslim serta berguna untuk perusahaan Islam dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap Allah SWT dan masyarakat. Landasan dasar pada kerangka *Islamic Social Reporting* yaitu menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah yang digunakan pada *Islamic Social Reporting* tidak hanya menghasilkan aspek material dan moral, fokus utamanya adalah menghasilkan aspek spiritual. *Islamic Social Reporting* merupakan perluasan dari *Social Reporting* dengan memasukkan perspektif spiritual (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Indeks *Islamic Social Reporting* menjadi tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi institusi yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah yang berisi kompilasi poin-poin standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai poin-poin CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Wulan dan Anggraini, 2015). *Islamic Social Reporting* pertama kali dikemukakan oleh Hanifah (2002) dengan melakukan pengungkapan 5 tema lalu

dikembangkan oleh Othman et al (2010) yang menambahkan satu tema dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Fenomena kasus mengenai hubungan perusahaan antara masyarakat dan lingkungan di Indonesia antara lain industri keruk tambang yang menghasilkan berbagai persoalan yang terus terjadi. Kasus lumpur lapindo dan keruk tambang Kalimantan Timur telah menghasilkan kerugian ekonomi dan kehilangan ruang hidup, bahkan industri yang rakus tanah dan air ini juga telah menjadi industri mematikan bagi anak-anak di Kalimantan Timur (Walhi, 2017).

Kasus tersebut tidak lain akibat dari persoalan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan belum sepenuhnya dibenahi. Dalam Islam menekankan peran manusia atas sesama makhluk hidup dan alam semesta dengan membuatnya bertanggungjawab terhadap lingkungan sekelilingnya. Allah menciptakan manusia bertujuan untuk menjadi khalifah dimuka bumi, dalam peranannya sebagai khalifah seorang Muslim diharapkan memelihara lingkungan alam dan mewujudkan keselamatan hidup dimuka bumi.

Temuan DNA babi pada produk Viostin DS (PT Pharos) dan Enzyplex (Media Farma) membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta produsen produk tersebut menarik kedua produk dari pasar. PT Pharos mengklaim, bahan baku produk yakni, didapat dari pemasok sudah tercemar. Pasalnya, pemasok menjamin bahwa bahan baku halal dibuktikan dengan sertifikat halal yang keluarkan *Halal Certification*

*Service* (HCS). Sementara HCS sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (CNN Indonesia, 2018).

Kasus Viostin DS dan Enzyplex menambah adanya isu kontroversi mengenai pencantuman sertifikasi halal pada produk di Indonesia. Mengingat memperoleh produk halal bagi setiap konsumen khususnya konsumen muslim adalah hak konstitusional, yang dijamin oleh konstitusi. Penerbitan sertifikasi halal pada produk merupakan bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*, khususnya konsumen (Putri dan Yuyetta, 2014).

Penelitian yang menguji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* telah banyak dilakukan oleh peneliti. Tetapi hasilnya masih beragam salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan Angraini (2015) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah dewan komisaris. Penelitian Wulan dan Angraini (2015) menunjukkan dewan komisaris terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian Wulan dan Angraini (2015) sejalan dengan penelitian Kurniawati dan Yaya (2017). Namun Penelitian Qoyyum dkk (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Faktor lain yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* adalah kepemilikan institusional. Penelitian Pratama dkk (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

*Islamic Social Reporting*. Penelitian Widiastuti dan Firman (2016) menyatakan kepemilikan institusional induk berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan penelitian Nugraheni dan Yuliani (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan Institusional (KI) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Komite audit didefinisikan sebagai salah satu faktor potensial yang mempengaruhi praktek pengungkapan sosial perusahaan. Adanya komite audit didalam perusahaan dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat meningkatkan pengendalian internal dan akan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan Kurniawati dan Yaya (2017). Penelitian Asyhari (2016) sejalan dengan penelitian Mahdalena (2017) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Namun penelitian Jannah dan Asrori (2016) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Faktor selanjutnya adalah surat berharga syariah (sukuk). Perusahaan yang memiliki jenis surat berharga lebih banyak mengungkapkan informasi *Islamic Social Reporting* lebih luas (Putri dan Yuyetta, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuyetta (2014) menyatakan bahwa surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Yulianto (2016). Namun penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih

dan Ferdiansyah (2017) menyatakan bahwa penerbitan sukuk tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Penelitian ini mengacu terhadap penelitian Kurniawati dan Yaya (2017) yang menggunakan lima variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, komite audit, profitabilitas dan kinerja lingkungan. Alasan mengacu penelitian ini adalah karena terdapat variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut dianggap memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Namun terdapat perbedaan yaitu: pertama, penelitian ini menghilangkan satu variabel independen yaitu independensi dewan komisaris dan mengganti dua variabel profitabilitas dan kinerja keuangan dengan kepemilikan institusional dan surat berharga syariah.

Alasan menghilangkan variabel independensi dewan komisaris karena independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Independen dewan komisaris tidak memiliki saham dalam perusahaan dan tidak memiliki hubungan usaha serta hubungan afiliasi dengan perusahaan. Sehingga adanya independensi dewan komisaris tidak mempengaruhi proses pengawasan terhadap kinerja perusahaan dalam mengungkapkan informasi secara luas (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Alasan mengganti variabel profitabilitas dan kinerja lingkungan karena variabel tersebut sudah sering digunakan dalam penelitian pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan hasil penelitian yang konsisten. Selain itu, variabel kepemilikan institusional dan surat berharga syariah diperkirakan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Perbedaan kedua adalah sampel penelitian dari penelitian sebelumnya pada perusahaan syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan mengikuti PROPER periode 2011-2015. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) dengan periode yang diambil yaitu 2014-2017. Alasan penggunaan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) sebagai sampel yaitu perusahaan yang terdaftar dalam JII mempunyai kapitalisasi saham yang cukup besar dan perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu pada perusahaan JII merupakan perusahaan listing dan sudah *go public* yang diperkirakan mempunyai data yang lengkap. Periode pengamatan tahun 2014-2017 untuk membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

Meskipun penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* sudah banyak dilakukan tetapi terdapat hasil penelitian yang belum konsisten. Faktor-faktor tersebut diantaranya dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit dan surat berharga syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* dan untuk mengetahui konsistensi temuan jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah *Kepemilikan Institusional* berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?
4. Apakah Surat Berharga Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?

## **C. Pembatasan Masalah**

Variabel dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Surat Berharga Syariah. Objek penelitian diambil dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar *Jakarta Islamic Index* periode 2014-2017.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*
- b. Untuk menemukan bukti empiris kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*
- c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*
- d. Untuk menemukan bukti empiris bahwa surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*

## **2. Manfaat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi investor dan calon investor, hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi untuk mengetahui perusahaan yang paling banyak menerapkan penggunaan indeks *Islamic Social Reporting* dalam pengungkapan laporan tahunannya, sehingga dapat memenuhi keinginan spiritual investor berupa pertanggung jawaban terhadap Allah SWT.
- b. Bagi pengguna laporan perusahaan lainnya seperti masyarakat, kreditur, pelanggan, supplier dan karyawan, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mengetahui perusahaan yang paling banyak menerapkan penggunaan indeks *Islamic Social Reporting* dalam pengungkapan laporan tahunannya, sehingga dapat digunakan sebagai informasi

tambahan dalam membuat keputusan terkait pertanggung jawaban terhadap Allah SWT.

- c. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi mengenai hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* dan hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Indeks* periode 2014-2017 untuk dapat melaksanakan dan menyusun pengungkapan laporan tahunan supaya sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat peraturan terkait kewajiban untuk membuat laporan atas pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan juga sebagai bahan pertimbangan atas bentuk indeks pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan Islam.
- e. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa memberikan tambahan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Dalam penelitian pengaruh dewan komisaris, kepemilikan institusional, komite audit, dan surat berharga syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* membutuhkan kajian teori. Beberapa teori menjelaskan mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

##### 1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan asumsi secara umum yang menyatakan bahwa kegiatan perusahaan didasarkan dan disesuaikan dengan konsep, nilai kepercayaan, dan ketentuan sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu menampakkan tujuannya yang sejalan dengan masyarakat (Wardhani dan Cahyonowati, 2011).

Perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat di lingkungan bisnisnya diharapkan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Adanya kontrak sosial yang bersifat implisit antara perusahaan dan masyarakat, pengungkapan tanggungjawab sosial dapat menjadi media komunikasi diantara keduanya yang diharapkan dapat memperbaiki legitimasi perusahaan, meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang dan memastikan *going concern* perusahaan (Lindawati dan Puspita, 2015).

## 2. **Teori Stakeholder**

Menurut Freeman (1984) *stakeholder* didefinisikan sebagai sebuah organisasi, grup atau individu yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi tujuan organisasi tersebut. Teori *stakeholder* merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan *stakeholder* baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap *stakeholder* yang ada.

Pengungkapan pelaporan tanggungjawab sosial dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para *stakeholder* akan informasi non keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik pengungkapan pelaporan tanggungjawab sosial oleh perusahaan akan membuat *stakeholder* memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan (Lindawati dan Puspita, 2015).

## 3. **Islamic Social Reporting**

*Social reporting* merupakan perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian (Haniffa, 2002). Kerangka syariah *Islamic Social Reporting* (ISR) pertama kali oleh Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting*

*Disclosure: An Islamic Perspective*”. *Islamic Social Reporting* lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini *Islamic Social Reporting* masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya (Cahaya Bayu, 2017).

Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* yang berdasarkan ketentuan syariah. *Islamic Social Reporting* adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya.

Landasan dasar pada kerangka *Islamic Social Reporting* yaitu menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah yang digunakan pada ISR tidak hanya menghasilkan aspek material dan moral, fokus utamanya adalah menghasilkan aspek spiritual (Kurniawati dan Yaya, 2017). Haniffa, (2002) mengemukakan bahwa tujuan *Islamic Social Reporting* sendiri adalah memdemonstrasikan akuntabilitas kepada Allah SWT dan komunitas. *Islamic Social Reporting* juga bertujuan meningkatkan transparansi dari aktifitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna laporan perusahaan yang muslim. Salah satunya

adalah menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan.

Kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* (tema pengungkapan *Islamic Social Reporting*) yang didasarkan pada ketentuan syariah diukur dengan menggunakan sebuah indeks yaitu indeks *Islamic Social Reporting*. Indeks ini lahir dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization Islam Financial Internasional*). Indeks *Islamic Social Reporting* adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting*, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2010) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema tata kelola perusahaan.

#### **4. Dewan Komisaris**

Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelolaan perusahaan atau pihak manajemen. Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang dianut, terdapat dua sistem hukum yang berbeda yaitu sistem satu tingkat dan sistem dua tingkat. Sistem satu tingkat adalah perusahaan mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara direktur eksekutif dan direktur independen

yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Sedangkan sistem dua tingkat perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan direksi yang diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas.

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Rustam, 2013). Adanya dewan komisaris di dalam perusahaan diharap akan mampu mendorong terciptanya sistem pengendalian yang baik bagi manajemen perusahaan (Kurniawati dan Yaya, 2017).

##### **5. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan asset manajemen. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional mayoritas mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Hery, 2014).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan (Subagyo, 2018).

## **6. Komite Audit**

Komite audit merupakan alat kelengkapan perusahaan yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Komite Audit bertugas untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, termasuk pemenuhan kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2011)

## **7. Surat Berharga Syariah**

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13 penerbitan surat berharga syariah, surat berharga syariah adalah sekuritas Islami dalam bentuk

sertifikat atau bukti kepemilikan dengan nilai yang sama dan merupakan bagian kepemilikan yang tidak terpisahkan atau terbagi atas kepemilikan aset berwujud yang diberikan, nilai manfaat dan layanan pada proyek atau aktivitas khusus aset dari investasi tertentu.

Surat berharga syariah atau sukuk adalah salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan Islam, yang merupakan salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam perkembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Penggunaan sukuk atau sekuritas Islam menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir ini, baik *government* sukuk maupun *corporate* sukuk. Sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islam (Faniyah, 2017).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tabel berikut menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Qoyum, Mutmainah, Setyono, dan Qizam (2017)	<i>Dependen :</i> <i>Disclosure CSR</i> <i>index ISR</i>  <i>Independen :</i> <i>Commisioner</i> <i>board, propotion of</i> <i>independent</i> <i>commisioner, sharia</i> <i>supervision board,</i> <i>director board and</i> <i>company size</i>	Dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan index ISR, proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan index ISR, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan index ISR,
2.	Anita Anggraini dan Mulyaning Wulan (2015)	<i>Dependen :</i> Pengungkapan ISR  <i>Independen :</i> Size, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Jenis Industri dan Ukuran Dewan Komisaris	<i>Size</i> , profitabilitas, <i>leverage</i> , jenis industri, dan ukuran dewan komisaris terbukti signifikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic social Reporting</i>
3.	Eka Widiastuti dan M. Asmeldi Firman (2016)	<i>Dependen :</i> Pengungkapan ISR  <i>Independen :</i> <i>Media exposure</i> , kepemilikan institusional induk, dan <i>Islamic</i> <i>Governance Score</i>  <i>Kontrol :</i> <i>Size</i> dan profitabilitas	1. <i>Media Exposure</i> berpengaruh signifikan terhadap ISR 2. Kepemilikan institusional induk, <i>leverage</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat ISR 3. IGS berpengaruh positif terhadap

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
			pengungkapan ISR
4.	Ratna Aditya Ningrum, Fachrurrozie dan Prabowo Yudo Jayanto (2013)	<p>Dependen : Pengungkapan ISR</p> <p>Independen : Kinerja Keuangan, Kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah</p>	Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.
5.	A. Nur Abdi Pratama, Saiful Muchlis dan Idra Wahyuni	<p>Dependen : Pengungkapan ISR</p> <p>Independen : Profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan <i>leverage</i></p> <p>Moderating : Komisaris independen</p>	Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>
6.	Awalya Ma'rifatul Jannah dan Asrori (2016)	<p>Dependen : Pengungkapan ISR</p> <p>Independen : Dewan komisaris, komite audit, <i>size</i>, jenis produk, dan kepemilikan saham</p>	Dewan komisaris, komite audit, kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap ISR sedangkan <i>size</i> dan jenis produk berpengaruh positif terhadap ISR
7.	Lutfan Dwi Asyhari (2016)	<p>Dependen : Pengungkapan ISR</p> <p>Independen : Ukuran komite audit, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, kepemilikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ukuran Komite Audit, <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR</li> <li>Komposisi Dewan Komisaris Independen, ukuran dewan pengawas</li> </ol>

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		manajerial, <i>leverage</i> dan profitabilitas	syariah, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR 3. Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR
8.	Mahardhika Kurniawati dan Rizal Yaya (2017)	Dependen : Pengungkapan ISR  Independen : Ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, komite audit, profitabilitas dan kinerja lingkungan	Ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR sedangkan independensi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.
9.	Tria Karina Putri dan Etna Nur Afri Yuyetta (2014)	Dependen : Pengungkapan ISR  Independen : Ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan surat berharga syariah	Ukuran perusahaan, tipe industri, dan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
10	Uun Sunarsih dan Ferdiyansyah (2017)	Dependen : Disclosure ISR  Independen : Sukuk, company size, dan profitabilitas	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR sedangkan penerbitan sukuk dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang termuat dalam teori legitimasi dan teori *stakeholder* mengandung esensi mendasar tentang pergeseran paradigma pengelolaan perusahaan kearah orientasi keberpihakan terhadap masyarakat secara lebih luas. Muatan pergeseran kearah orientasi komuniti tersebut sudah barang pasti akan lebih banyak bermuatan tanggungjawab sosial yang pada akhirnya justru dapat dijadikan pilar dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Nor Hadi, 2009).

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* merupakan kerangka pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang digunakan pada *Islamic Social Reporting* tidak hanya menghasilkan aspek material dan moral, fokus utamanya adalah menghasilkan aspek spiritual (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Dewan komisaris mempunyai peran sebagai seorang yang bertugas mengawasi dan memberikan saran-saran kepada manajemen dalam lingkup pengelolaan perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang besar dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam praktik dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Fahmi, 2015).

Menurut Fahmi (2015) Peran dan fungsi dewan komisaris dalam perusahaan jika dijalankan dengan baik, benar dan berimbang antara bidang pengawasan dengan jumlah anggotanya, maka pihak manajemen akan lebih

berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaannya, karena jumlah dewan komisaris dinilai berkaitan dengan kuat lemahnya pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Hal ini dapat mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.

Sesuai dengan teori *stakeholder* bahwa dewan komisaris akan melakukan pengawasan dan mengarahkan manajemen untuk membuat perusahaan memberikan manfaat terhadap *stakeholder*-nya sebagai bagian yang mempengaruhi perusahaan. Semakin banyak komisaris maka semakin mudah dalam pengontrolan kinerja manajer serta terciptanya efektivitas di perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepemilikan institusional menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Investor institusional adalah sebuah entitas, perusahaan, atau kelompok sejenis lainnya yang mana memiliki dana atau aset dalam jumlah yang besar untuk berinvestasi (Hery, 2014). Investor institusi sering dikatakan mempunyai dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan investor lain. Dana yang besar dari institusional dan kredibilitas yang didapatkan dari investor institusional sering menjadi incaran perusahaan-perusahaan. Perusahaan akan berusaha melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan agar mampu terlihat memiliki prospek ke depan yang baik sehingga terlihat menarik bagi investor institusional. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi bahwa

perusahaan akan melakukan strategi untuk mendapatkan legitimasi dan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang (Saleh et al, 2010).

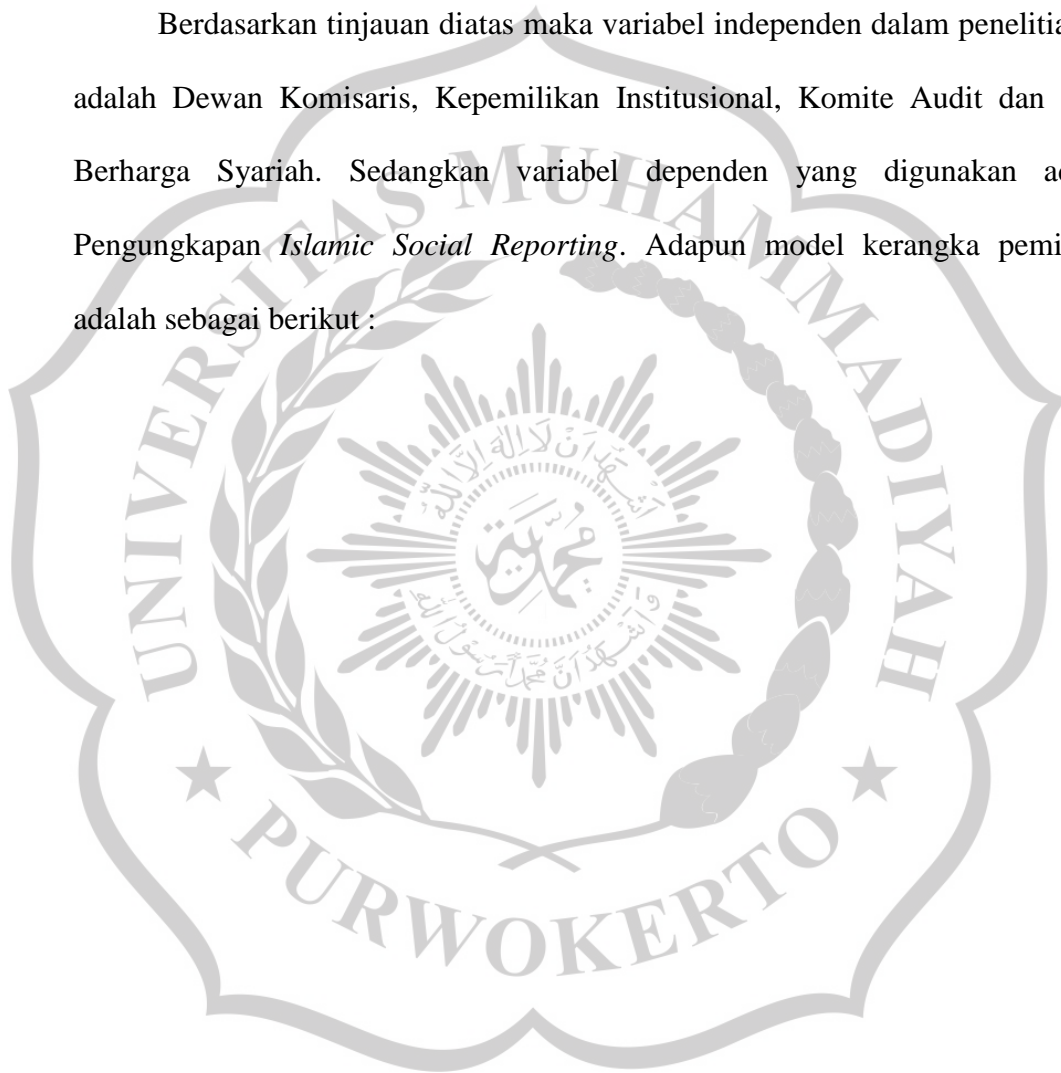
Komite audit merupakan alat kelengkapan perusahaan yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Kurniawati dan Yaya, 2017). Hal tersebut sesuai dengan teori legitimasi bahwa peningkatan pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi yang baik maka akan memperoleh legitimasi dari internal dan eksternal perusahaan.

Surat berharga syariah adalah sekuritas Islami dalam bentuk sertifikat atau bukti kepemilikan dengan nilai yang sama. Surat berharga syariah merupakan bagian kepemilikan yang tidak terpisahkan atau terbagi atas kepemilikan aset berwujud yang diberikan, nilai manfaat dan layanan pada proyek atau aktivitas khusus aset dari investasi tertentu (Baepam-LK No. IX.A.13).

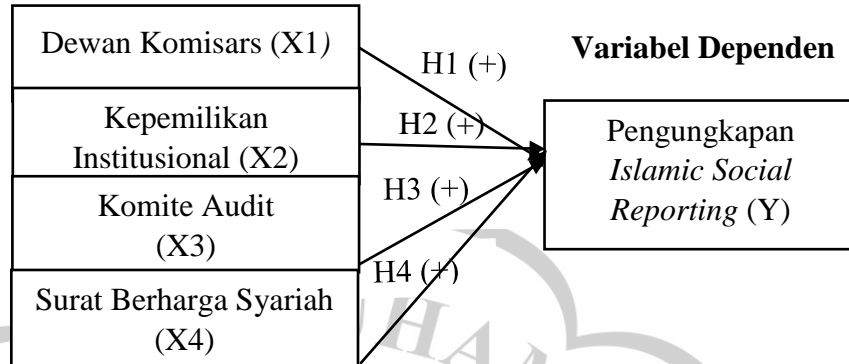
Perusahaan yang terdapat surat berharga syariah dalam laporan tahunannya diperkirakan akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah lebih luas. Perusahaan memperhatikan keinginan investor Muslim mengenai informasi dana yang mereka investasikan benar-benar digunakan untuk kegiatan sesuai syariah Islam. Informasi tambahan dibutuhkan sebagai salah satu bentuk monitoring pemegang sekuritas atas penggunaan dana. Hal ini sesuai dengan teori

*stakeholders* yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan saja tetapi perusahaan harus memberikan manfaat terhadap *stakeholder*-nya.

Berdasarkan tinjauan diatas maka variabel independen dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Surat Berharga Syariah. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Adapun model kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :



## Model Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Metode Penelitian

### D. Hipotesis

#### **Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan saja tetapi perusahaan harus memberikan manfaat terhadap *stakeholder*-nya. Dewan komisaris akan melakukan pengawasan dan mengarahkan manajemen untuk membuat perusahaan memberikan manfaat terhadap *stakeholder*-nya sebagai bagian yang mempengaruhi perusahaan. Dalam hal ini pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah wujud kepedulian perusahaan terhadap *stakeholder*. Semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* akan semakin luas (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Penelitian Wulan dan Anggraini (2015) dan Kurniawati dan Yaya (2017) mengungkapkan bahwa dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian tersebut mendukung penelitian Khoirudin (2013) bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Investor institusi sering dikatakan mempunyai dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan investor lain. Dana yang besar dari institusional dan kredibilitas yang didapatkan dari investor institusional sering menjadi incaran perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan agar mampu terlihat memiliki prospek ke depan yang baik sehingga terlihat menarik bagi investor institusional. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi bahwa perusahaan akan melakukan strategi untuk mendapatkan legitimasi dan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang (Saleh et al, 2010).

Penelitian yang dilakukan Pratama dkk (2018) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian Pangesti (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan

institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengemukakan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab dalam hal memberikan pengawasan secara menyeluruh dalam laporan keuangan, pengawasan kontrol, dan tata kelola perusahaan. Salah satu tugas komite audit adalah memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Adanya komite audit didalam perusahaan dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi (Kurniawati, 2016). Dengan pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi yang baik maka akan memperoleh legitimasi dari internal dan eksternal perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi.

Penelitian Asyhari (2016), Lestari (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. Selain itu penelitian Mahdalena (2017) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan indeks *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

### **Pengaruh Surat Berharga Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Menurut Putri dan Yuyetta (2014) Perusahaan yang memiliki jenis surat berharga syariah lebih banyak memiliki tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* lebih besar dibanding perusahaan yang hanya memiliki satu jenis surat berharga syariah. Hal tersebut sesuai dengan teori *stakeholders* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholders*nya. Semakin baik pengungkapan tanggungjawab sosial oleh perusahaan akan membuat *stakeholder* memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan (Lindawati dan Puspita, 2015).

Penelitian Maharani dan Yulianto (2016) dan Elendri (2017). menyatakan bahwa surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Putri dan Yuyetta (2014) bahwa surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.